

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Command Center, Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Akan Dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	- UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkin bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu -Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN -Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu -Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan	- Melindungi data pribadi ASN -Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu -Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

			atau gugatan ke pengadilan		
3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perwakinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- melanggar HAM</li> <li>- bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>-Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>-Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
4	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>-UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- PP No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- melanggar HAM</li> <li>- bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>-Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>-Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
5	Data Rekam Medis ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/11/2008 tentang Rekam Medik, Pasal 1c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- melanggar HAM</li> <li>- bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>-Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>-Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

				- Keamanan dan kenyamanan ASN yang bersangkutan	
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hurufi - PP No.10 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000	-Menggangu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Dapat merugikan pemerintah daerah dan ASN yang bersangkutan	- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilan keputusan - Menjaga keamanan pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
7	Arsip dinamis yang menurut sidatnya rahasia	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hurufi - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008tentang KIP Pasal 17 hurufi dan huruf j -Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	- Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan atau program karena adanya pengungkapan secara prematur - Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif	- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar - Mencegah terjadinya penilaian yang tidak obyektif	Selama Proses penawaran berjalan

9	Dokumen penawaran kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j. - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa selesai
10	Lokasi server	UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 30-37 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37	- Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Mengamankan perangkat - Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif
11	Internet Protokol/IP Address Privat	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3	Serangan Hacker	Mencegah serangan hacker dan Selama masih perlindungan hak privatisasi	Selama masih aktif
12	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
13	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
14	Sistem keamanan elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama masih aktif

		- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		-Menjaga keamanan jaringan komputer	
15	Sistem Management Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain -Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif digunakan
16	Hasil Pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	- UU No.1 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i. - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah. - Peraturan Mendagri No. 28 tahun 2007, norma pengawasan pemerintah lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a	Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam Sampai ada mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum
17	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran

18	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
19	Data KAK/OE/HPS/RAB	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bisa menyebabkan proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pelelangan	Untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pelelangan sehingga proses berjalan dengan lancar karena sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelelangan	Selama Proses Lelang hingga selesai
20	Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Serangan hacker	- Menghindari serangan hacker - Perlindungan Hak Privat - Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
21	Data Center Room	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	Pengamanan data	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
22	Surat/Dokumen/Infomasi Persandian	Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara	Tersebar nya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
23	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum	Sampai ada keputusan hukum

		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Memungkinkan penyalahgunaan informasi	- Mencegah penyalahgunaan informasi	
24	Bahan/data Pemeriksaan	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
25	Identitas Pelapor/Pengadu	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Mengancam keamanan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
26	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan Data pribadi - Mendapat gugatan dari yang bersangkutan	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
27	Laporan Visum ET Repertum	- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis	Bila dibuka tanpa seizin penyidik alat bukti ini akan cacat hukum dan tidak bisa digunakan untuk proses peradilan	Akan menjadi alat bukti yang hanya bisa diakses oleh penegak hukum yang menangani perkara	Selama proses hukum masih berlaku di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

28	Resume Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2</li> <li>- Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien</li> <li>- Semua orang/publik dapat mengetahui kondisi si sakit</li> </ul>	- Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
29.	Identitas pribadi pelapor (datang langsung/telepon)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis
30	Identitas pribadi klien (perempuan dan anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Pasal 17 ayat 2)</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal19</li> </ul>	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak dan rahasia pribadi klien	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai



		Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			
31	Identitas pribadi terlapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan
32	Dokumen form pengaduan dan hasil assesmen klien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi klien	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
33	Informed Consent	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi klien	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membantu penyelesaian kasus dalam proses layanan
35	Laporan hasil klarifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membantu

					penyelesaian kasus dalam proses layanan
36	Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membantu penyelesaian kasus dalam proses layanan
37	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membantu penyelesaian kasus dalam proses layanan
38	Alamat rumah aman	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	Perlindungan terhadap klien	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membantu penyelesaian kasus dalam proses layanan
39	Dokumen reintegrasi korban:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Penyerahan Klien</li> <li>2. Surat Tanda Terima Barang</li> <li>3. Surat Pernyataan Orang Tua</li> </ol>	Keterbukaan Informasi Publik			pihak yang berkepentingan untuk membantu penyelesaian kasus dalam proses layanan
40	Dokumen pendukung layanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Cerai</li> <li>2. Lapsos</li> <li>3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan</li> <li>4. Laporan Polisi</li> <li>5. DII.</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membantu penyelesaian kasus dalam proses layanan
41	Dokumen administrasi rujukan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membantu penyelesaian kasus dalam proses layanan
42	Laporan hasil tindak lanjut layanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam

					pelaksanaan layanan
43	Dokumentasi pelayanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan
44	Surat Terminasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan



